**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari fenomena Kebijakan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Provinsi Banten. Hasil observasi menunjukkan evaluasi kebijakan Jamsosratu di Provinsi Banten belum terlaksana sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan, indikasinya dapat dilihat dari Tim Pengendali Jaminan Dinas Sosial Provinsi Banten, perlu lebih meningkatkan fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan dalam explanasi kebijakan pada tingkat pelaksanaannya, evaluasi kepatuhan di lapangan dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai standar dan prosedur kebijakan program Jamsosratu. Evaluasi Audit kebijakan program Jamsosratu apakah sampai ke kelompok sasaran, Evaluasi Akunting kebijakan apakah program jamsosratu memberikan dampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran.

Fokus penelitian mengkaji evaluasi kebijakan Jamsosratu di Provinsi Banten, apakah telah sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan Jamsosratu ini dapat dirasakan manfaatnya oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS).Pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana evaluasi kebijakan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Provinsi Banten.

Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan cara observasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap representatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan secara umum program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Jamsosratu di Provinsi Banten, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Tetapi bila dilihat dari pencapaian target RTSM per-Desember 2014 baru mencapai 88.408 RTSM (65 %), sebanyak 48.524 (35 %) belum tersentuh program kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan Jamsosratu di Provinsi Banten masih belum optimal dengan mengacu pada fungsi dan tujuan evaluasi kebijakan.

Kesimpulan penelitian dapat diungkapkan bahwa evaluasi kebijakan Jamsosratu belum belum optimal, di mana pada fungsi eksplanasi kebijakan Jamsosratu pada tingkat pelaksanaan baru mencapai 65 % karena masih ada daerah kab/kota yang belum melaksanakan, kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan belum seluruhnya dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi karena kondisi infrastruktur kab./kota yang belum mendukung, demikian juga evaluasi audit dan akunting belum optimal dengan mengukur pada standar sosial ekonomi dan keuangan kelompok sasaran.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Jaminan Sosial.